

LAPORAN  
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

**STRATEGI PERKADERAN PARTAI POLITIK DALAM  
REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL**



Tim Pengusul

Pahman Habibi, S.E., M.M. (0307088306)

Fitrisia, S.E., M.Si. Ak., CA (0302026502)

Nomor Surat Kontrak Penelitian : 716/F.03.07/2019

Nilai Kontrak : Rp.10.000.000,-

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN 2020

## HALAMAN PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

**Judul Penelitian**  
STRATEGI PERKADERAN PARTAI POLITIK DALAM REGENERASI  
KEPEMIMPINAN NASIONAL

**Jenis Penelitian** : PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)

**Ketua Peneliti** : Pahman Habibi, S.E., M.M.

**Link Profil simakip** : <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/1120>

**Fakultas** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Anggota Peneliti** : Fitriisia, S.E., M.Si., Ak., CA

**Link Profil simakip** : <http://simakip.uhamka.ac.id/pengguna/show/689>

**Waktu Penelitian** : 6 Bulan

**Luaran Penelitian**

**Luaran Wajib** : Jurnal Nasional Terakreditasi sinta 3

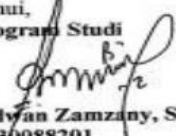
**Status Luaran Wajib** : In Review

**Luaran Tambahan** : Hak Kekayaan Intelektual

**Status Luaran Tambahan** : Pendaftaran

---

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

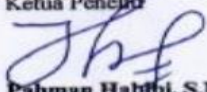


Faizal Ridwan Zamzany, S.E, M.M.  
NIDN. 0330088201

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nuryadi, S.E., M.M.  
NIDN. 0327056501

Jakarta, 14 Oktober 2019  
Ketua Peneliti



Pahman Habibi, S.E., M.M.  
NIDN.0307088306

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd  
NIDN. 0020116601

## SURAT KONTRAK PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

129

### SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

Nomor : *76* / F.03.07 / 2019  
Tanggal : 20 November 2019

#### *Bismillahirrahmanirrahim*

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; - **PAHMAN HABIBI SE., MM**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

#### Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **STRATEGI PERKADERAN PARTAI POLITIK DALAM REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Bacth 1 Tahun 2019 melalui [simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id).

#### Pasal 2

Bukti luaran penelitian wajib dan tambahan harus sesuai sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1, Luaran penelitian yang dimaksud dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan penelitian yang diunggah melalui [simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id).

#### Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 November 2019 dan selesai pada tanggal 20 April 2020.

#### Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Terbilang : *Sepuluh Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;  
(1) Termin I 70 % : Sebesar 7.000.000 (Terbilang: *Tujuh Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 3.000.000 (Terbilang: *Tiga Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

#### Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 5 % (lima persen)

Jakarta, 20 November 2019

PIHAK PERTAMA  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Prof. Dr. Hj Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA  
Peneliti,

- PAHMAN HABIBI SE., MM

Mengetahui  
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

## ABSTRAK

Kepemimpinan nasional harus diisi dengan orang-orang yang memahami nilai yang terkandung dalam 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945. Kepemimpinan nasional di Indonesia diisi oleh Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR. Ketiganya diusulkan partai politik dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Partai politik memiliki peran penting dalam terpilihnya para pimpinan nasional melalui kadernya. Proses perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam menentukan kualitas kadernya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang strategi partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader partai politik. Berdasarkan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi deskriptif. Strategi yang dilakukan partai politik dalam rangka regenerasi dan mengisi kepemimpinan nasional yaitu dengan rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader politik. Partai politik harus memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam perkaderan, sehingga dapat terlihat konsistensinya dalam perkaderan. Partai politik dapat melakukan rekrutmen kader secara langsung maupun *talent scouting*. Perkaderan tidak berhenti sampai proses rekrutmen, partai politik perlu memiliki lembaga pendidikan dengan sistem dan kurikulum yang terstruktur sehingga berperan dalam regenerasi kader. Menerapkan sistem *reward and punishment*, sehingga terjadi seleksi alam terhadap para kader.

***Kata kunci: Kepemimpinan Nasional, Partai Politik, Regenerasi.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	2
SURAT KONTRAK PENELITIAN .....	3
ABSTRAK .....	5
DAFTAR ISI .....	6
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR GAMBAR .....	8
BAB 1. PENDAHULUAN .....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	12
BAB 3. METODE PENELITIAN .....	21
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	24
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	43
BAB 6 LUARAN YANG DICAPAI .....	44
BAB 7 RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	52

## DAFTAR TABEL

PENELITIAN TERDAHULU MENGENAI PARTAI POLITIK .....	1
PENELITIAN TERDAHULU MENGENAI KEPEMIMPINAN .....	2

## DAFTAR GAMBAR

<i>ROADMAP</i> PENELITIAN .....	20
DIAGRAM ALUR PENELITIAN .....	23



## BAB 1. PENDAHULUAN

SDM Unggul Indonesia Maju menjadi tema dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Sumber daya manusia menjadi tumpuan utama dalam membangun bangsa dan negara terutama pemimpin nasional. Setiap keputusan yang diambil kepemimpinan nasional akan menentukan nasib bangsa Indonesia di kemudian hari. Joko Widodo, Presiden RI menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu “*Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila*”. Pancasila merupakan salah satu dari empat konsensus dasar negara Indonesia. Begitu juga dengan kepemimpinan nasional, harus diisi dengan orang-orang yang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945.

Kepemimpinan nasional adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) pada bidang/sector profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Lemhannas, 2018). Kepemimpinan nasional di Indonesia antara lain diisi oleh Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Pada Pasal 6A UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Sedangkan untuk pemilihan anggota legislatif dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib BAB II Pasal 2 yaitu DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan UUD 1945 dan

Peraturan DPR RI jelas bahwa partai politik memiliki peranan penting dalam terpilihnya para pimpinan nasional melalui kadernya.

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengertian partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Anggota dari partai politik yang biasa disebut kader partai berperan untuk mewujudkan cita-cita partai serta bangsa dan negara. Untuk menciptakan kader partai yang berkualitas bukan hal yang mudah, diperlukan perekrutan dan pembinaan kader secara terstruktur. Banyaknya pemberitaan negatif terhadap kader partai politik yang menjadi pimpinan lembaga dan anggota DPR, dapat menciptakan stigma negatif dari masyarakat terhadap kader partai politik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi partai politik. Partai politik harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa kader partai layak untuk dipilih sebagai pemimpin.

Proses perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam menentukan kualitas dari kadernya. Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29(1) Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik dengan cara yang demokratis dan terbuka. Partai politik seharusnya tidak hanya melihat popularitas dari kader yang diusungnya untuk maju dalam Pemilu, akan tetapi perlu juga melihat *track record* dan *skill* yang dimiliki. Pengkaderan juga sebaiknya dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu. Partai politik seharusnya tidak berhenti pada proses rekrutmen tetapi perlu ada pembinaan terhadap kader. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendidikan politik secara terstruktur dan berkesinambungan. Partai politik perlu menciptakan budaya organisasi dimana terdapatnya regenerasi dalam kepemimpinan. Sehingga, kader-kader partai politik akan mampu mengisi kepemimpinan nasional yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masih kurangnya kader partai yang berkualitas untuk dapat mengisi kepemimpinan nasional, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana strategi yang dilakukan partai politik dalam rangka rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader politik secara terstruktur agar berjalan dan menghasilkan kader yang berkualitas untuk mengisi dan proses regenerasi kepemimpinan nasional. Untuk menjawab rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang strategi partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader partai politik.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi banyak pihak baik praktisi maupun akademisi dan menjadi salah satu referensi dalam proses pengkaderan dalam partai politik. Untuk pemerintah dan partai politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam regenerasi kepemimpinan nasional yaitu dengan membentuk lembaga pendidikan kader politik, sistem rekrutmen dan pembinaan kader secara terstruktur dalam partai politik, dan menjadikan partai politik sebagai lembaga penegak etika dan budaya politik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Kepemimpinan Nasional**

Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif merupakan para pemimpin nasional. Definisi kepemimpinan nasional sendiri adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) pada bidang/ sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/ mengerahkan segenap potensi kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Lemhannas, 2018).

Kepemimpinan menjadi fokus utama dalam sebuah organisasi, begitu juga dalam pemerintahan di Indonesia. Pemimpin nasional memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaan kepemimpinan nasional tidak boleh kosong. Setiap kepemimpinan memiliki masanya, sehingga diperlukan pengganti untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya sebagai berikut (Rivai, 2009).

1. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi
2. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar
3. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (Pensiun)
4. Kematian
5. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan

Begitu pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan, termasuk kepemimpinan nasional. Partai politik sebagai lembaga penyalur pemimpin nasional, harus mampu menciptakan pemimpin nasional yang berkualitas di setiap masa nya. Sehingga regenerasi dalam kepemimpinan nasional tetap terjaga.

## **Partai Politik**

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008) adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Di era demokrasi, partai politik menjadi penyambung lidah rakyat dengan penguasa. Seperti fungsi partai politik menurut Budiardjo (2008) adalah menciptakan mekanisme artikulasi kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat diakomodir secara luas oleh pemerintah yang pada gilirannya akan menjadi pola yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat.

Pada Undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 11 disebutkan bahwa partai politik memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana pendidikan politik. Menurut Rusadi Kantaprawira (2004) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun ini formal

Adanya pendidikan politik yang dilakukan secara intensif oleh partai politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik. Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah '*public policy*'. Partisipasi politik diharapkan dapat membentuk pemerintahan '*good governance*'.

Partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat salah satu adalah dengan ikut bergabung dalam partai politik. Berdasarkan definisinya, partai politik merupakan sebuah kelompok yang memiliki anggota dengan cita-cita yang sama maka partai politik perlu melakukan kegiatan kaderisasi dan rekrutmen. Para kader partai tersebut merupakan ujung tombak dari partai politik. Sebuah partai

politik akan berkembang atau tidaknya tergantung pada proses regenerasi kadernya. Pengertian kader menurut Yudhoyono (dalam Sahid, 2011) adalah sebagai berikut.

1. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
2. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah kontrol organisasi.
3. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Rekrutmen dalam rekrutmen politik misalnya merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin & Nasiwan, 2013). Proses rekrutmen kader tidak hanya dilakukan ketika partai membutuhkan kader untuk menduduki jabatan politis. Akan tetapi proses rekrutmen ini perlu dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi regenerasi pimpinan baik dalam partai politik maupun pemerintahan. Seperti dijelaskan oleh Koirudin (2004) bahwa dalam proses kaderisasi terdapat 2 persoalan penting yaitu 1) Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun kemampuan; dan 2) Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia untuk organisasi terutama dikhususkan untuk kaum muda. Untuk menciptakan regenerasi pimpinan, partai politik tidak hanya melakukan rekrutmen tetapi juga melakukan pembinaan kepada setiap kadernya. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis (rekrutmen) (Azwar, 2008).

Beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik (Pahlevi, 2013) adalah sebagai berikut.

1. Partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.

2. *Compartmentalization*, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
3. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan direkrut.
4. *Civil Service Reform*, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting.

Pada pelaksanaan di lapangan, beberapa partai politik melakukan proses rekrutmen dengan cara *immediate survival* sehingga munculnya beberapa dinasti politik di Indonesia. Selain itu, proses rekrutmen dengan cara *compartmentalization* mulai muncul dengan adanya *talent scouting* yang dilakukan oleh partai politik.

Seseorang yang telah bergabung dalam partai politik wajib untuk menaati AD dan ART partai. Hal tersebut dijelaskan pada Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagai berikut.

1. Pasal 11(3) anggota partai politik wajib memenuhi AD dan ART serta berkewajiban dalam kegiatan parpol.
2. Pasal 12 anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat diberhentikan dari keanggotaan parpol bersangkutan karena melanggar AD/ART.
3. Pasal 29(1) dalam rekrutmen, yang melakukan adalah partai politik. Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan AD/ART masing-masing partai politik dengan cara yang demokratis dan terbuka.

Berdasarkan Undang-undang tersebut jelas bahwa partai politik memiliki wewenang untuk melakukan sistem *reward and punishment* dalam proses rekrutmen anggota. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan kader partai politik yang berkualitas.

### ***State of The Art***

Kondisi politik di Indonesia dengan dinamika di dalamnya, menarik perhatian para peneliti untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian. Beberapa penelitian mengenai partai politik 5 tahun kebelakang antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu Mengenai Partai Politik**

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode	Simpulan
1.	Dinamika Partai Politik di Indonesia, A. Gau Kadir, 2014	Kualitatif-deskriptif.	Lahirnya partai-partai politik baru menjadikan fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik Indonesia. Hal ini dapat diamati pada fungsi dan peranannya dalam mengajukan calon legislator nasional dan lokal, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota serta melakukan ‘uji kelayakan’ calon pejabat-pejabat publik lainnya.
2	Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015, Angga Natalia, 2015	Kualitatif-deskriptif	Partai-partai lebih banyak mengandalkan kader-kader pragmatis untuk mempercepat <i>image building</i> dan perolehan suara di <i>grass root</i> .
3	Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. R. Widya Setiabudi Sumadinata, 2016.	Analisis Logika Fuzzy	ideologi tidak dapat dijadikan sebagai preferensi koalisi partai politik secara absolut. Karena terbukti bahwa komposisi koalisi tidak selalu dibentuk atas dasar ideologi. Penjelasan yang lebih sering dikemukakan para analis untuk menjelaskan terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau office seeking Partai-partai politik di Indonesia belum mampu secara mandiri dalam hal pendanaan partai, selama



			ini sumber pendapatan partai terbesar adalah dari APBN yang diperoleh melalui anggota-anggota partai politik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif melalui berbagai modus, misalnya institutional fee dari anggaran suatu proyek dimana lembaga tempat proyek tersebut berada dikuasai oleh kader partai tersebut
4	Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia, Abd. Rahman Mazawi, 2017	Kualitatif-deskriptif	Secara kelembagaan partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat kelembagaan. Pada umumnya partai politik belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik.
5	Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada PEMILU 2019, Ridho Imawan Hanafi, 2018	Kualitatif-deskriptif	Partai politik yang cenderung tidak memiliki figure kuat dapat menawarkan kepada pemilih yang berbasis gagasan atau program, sehingga tidak tergantung pada figure tertentu untuk merebut simpati. Dengan demikian, pencapaian partai akan banyak ditentukan oleh mesin organisasi, kader partai, dan bagaimana strategi partai politik menawarkan program yang dapat dijadikan tawaran kepada pemilih.

*Sumber: Diolah oleh Penulis, (2019)*

Beberapa penelitian tersebut mengarah pada bagaimana peran dan fungsi partai politik dalam proses demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Partai politik

sebagai pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pemilu, berperan menyiapkan calon pemimpin nasional. Mengenai kepemimpinan nasional, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu Mengenai Kepemimpinan**

No.	Judul, Penulis, Tahun	Metode	Simpulan
1.	<i>Relationship Maintenance Strategies</i> Pemimpin Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 Melalui <i>Website</i> . Marcella Stephanie, 2014.	Kuantitatif	Di Indonesia, praktik political public relations melalui website telah mulai berkembang. Aktor politik, atau dalam hal ini ialah pemimpin partai politik, telah menjalankan relationship maintenance strategies melalui media digital website sebagai strategi untuk membangun dan memelihara hubungan dengan publiknya. Secara keseluruhan, strategi assurances merupakan strategi yang paling banyak digunakan oleh pemimpin partai politik melalui pernyataan dalam artikel websitenya yang menjelaskan program-program yang dijanjikan bila ia dan/atau partainya berhasil meraih target tertentu dalam pemilihan umum
2	Pengembangan Model Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hiryanto dkk., 2015.	Penelitian & pengembangan	Hal-hal yang dibutuhkan organisasi kepemudaan antara lain kebutuhan pelatihan kepemimpinan pengurus organisasi kepemudaan serta pengembangan model pelatihan kepemimpinan pengurus organisasi

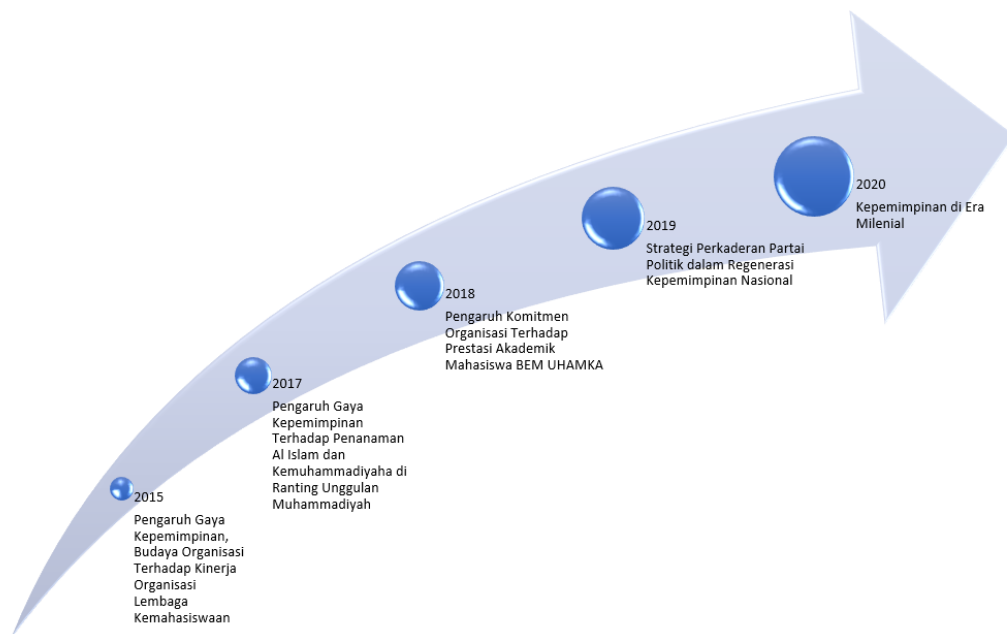
			kepemudaan.
3	Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi, Wafia Silvi Dhesinta, 2016	Kualitatif-deskriptif	Tingkat partisipasi partai politik ataupun calon independent untuk ikut serta dalam proses pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan memberikan hak pilihnya.
4	Peran Pimpinan dalam Kaderisasi Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Nursal & Rusmadi Awza, 2017.		Kepindahan kader dari partai politik lain ke salah satu partai politik peserta pemilu 2019 dilatar belakangi oleh tidak lolosnya partai pengusung pada pemilu 2009 yang lalu sebagai konsekuensi dari sistem <i>parliamentary threshold</i> . Rekrutmen ini bisa terjadi karena telah sesuai mekanismenya dan kriteria yang diterapkan oleh partai politik terhadap anggota baru serta bagaimana hubungan baik yang terjalin antara ketua Partai.
5	Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi. M. Makhfudz, 2018	Kualitatif-deskriptif	Dalam permasalahan menghadapi krisis kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing bangsa maka dapat disimpulkan antara lain kondisi negara dalam memilih calon yang makin jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sehat, karena dengan adanya usaha menutup celah partai politik untuk mengusulkan calon pemimpinnya dengan syarat yang berat dikenal dengan nama "presidensial threshold" sehingga memaksakan adanya calon tunggal dimana calon

			pemimpin disandingkan dengan kotak suara kosong
--	--	--	---

*Sumber: Diolah oleh Penulis, (2019)*

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti fokus pada proses rekrutmen kader yang dilakukan oleh partai politik, sehingga menghasilkan dan adanya regenerasi kepemimpinan nasional. Peneliti mengamati bagaimana proses dan strategi yang dilakukan partai politik dalam rekrutmen kader hingga penentuan calon yang diajukan sebagai pimpinan nasional.

### **Roadmap Penelitian**



**Gambar 1. Roadmap Penelitian**

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi yang dilakukan partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader partai politik. Berdasarkan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif (*qualitative research*). Penelitian yang dilakukan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang dilakukan partai politik dalam regenerasi kepemimpinan nasional yaitu mengenai proses rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader partai politik. Menurut Creswell (2015) desain studi kasus fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, karena kasus tersebut menghadirkan situasi yang tidak biasa atau unik. Setiap Partai Politik memiliki ideologi dan visi misi yang berbeda, oleh karena itu desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh partai politik tingkat nasional yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2019. Partai politik peserta Pemilu 2019 adalah 19 partai politik, yang terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal. Keempat partai tersebut tidak termasuk dalam populasi penelitian. 16 partai politik yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan nomor urut pemilihan di Pemilu 2019 adalah PKB, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PBB.

Penetapan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Partai politik yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah partai Golkar. Pada awalnya di zaman orde baru Golkar bukan merupakan partai politik. Sebagai Organisasi Peserta Pemilu, Golkar mengikuti perhelatan pemilu yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

dengan perolehan suara yang tinggi. Pada pemilu tahun 2004, Golkar memenangkan pemilu dengan perolehan 21,58 persen (Mazawi, 2017). Pada pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2009 dan 2014, walaupun tidak memenangkan pemilu tetapi Partai Golkar termasuk kedalam lima besar perolehan suara. Sebagai partai besar, Golkar tidak lepas dari konflik internal partai. Fraksi politik yang kalah membentuk partai-partai baru, di antaranya melahirkan PKPI, Hanura, Gerindra, dan Nasdem (Haris dkk., 2016). Selain itu, Partai Golkar juga memiliki beberapa organisasi sayap yaitu Barisan Muda Tri Karya Golkar, BMPG, AMPI, KPPG, Kosgoro 1957, SOKSI, MKGR, Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, Pengajian Al Hidayah, dan Relawan Beringin (Haris dkk., 2016). *Sampling* dalam penelitian kualitatif bukanlah sampel probabilitas yang akan memungkinkan seorang peneliti untuk menentukan kesimpulan statistic pada populasi; tetapi, sampel ini adalah sampel *purposeful* yang akan mencontohkan kelompok yang dapat memberi informasi terbaik pada peneliti tentang permasalahan yang sedang dipelajari. Melihat sepak terjang Partai Golkar dalam dunia politik di Indonesia, maka Partai Golkar dipilih sebagai sampel penelitian ini.

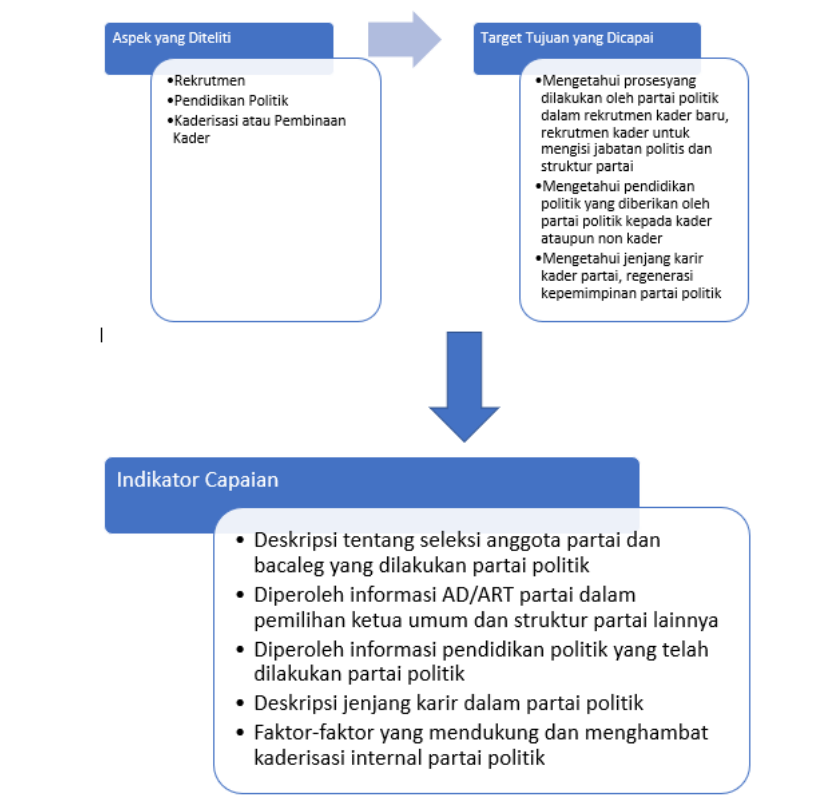
### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Pada penelitian kualitatif, *positioning* peneliti menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan data yang otentik (Somantri, 2005). Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap informan, yaitu DPP Partai Golkar, ahli di bidang politik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, dimana peneliti memiliki *guideline* namun dapat berkembang tergantung pada waktu dan informan. Untuk melengkapi data penelitian, peneliti melakukan pengamatan pada partisipan yaitu Partai Golkar. Sedangkan dokumen diperoleh melalui pengumpulan data baik yang bersifat pribadi atau public seperti AD/ART, jurnal, dan pemberitaan pada media *online*.

## Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumenter. Aktivitas analisis data meliputi tiga unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun studi dokumenter dikelompokkan sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan. Selain melaksanakan ketiga langkah dalam analisis data, perlu juga dilakukan verifikasi data yang dilaksanakan selama penelitian dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam verifikasi data menurut Creswell (2015) adalah perpanjangan waktu kerja dan observasi, triangulasi, review sejawat, klarifikasi bias peneliti, dan cek anggota. Verifikasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dan review sejawat.

## Diagram Alur Penelitian



**Gambar 2. Diagram Alur Penelitian**

#### BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Golkar pada pemilu 2019 mendapat perolehan suara sebanyak 12,31%. Partai Golkar masuk ke dalam 5 besar partai dengan perolehan suara terbanyak dan memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Masuk kedalam 5 besar perolehan suara terbanyak, berhasil dipertahankan oleh Partai Golkar sejak Pemilihan Umum langsung dilaksanakan. Hasil perolehan suara Partai Golkar juga hampir merata di berbagai daerah. Ma'mun Murod, Dekan FISIP UMJ berpendapat perolehan suara Partai Golkar yang cukup merata di berbagai daerah menunjukkan Partai Golkar sebagai partai nasional dan bisa diterima banyak kalangan. Partai Golkar bisa disebut sebagai partai massa dan telah memiliki massa sudah sejak lama. Loyalitas kader terhadap partai salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan politik yang dilakukan partai. Menurut Hassanudin (2013) kurangnya intensitas pendidikan politik membawa pengaruh besar terhadap eksistensi partai di tengah masyarakat karena pendidikan politik dilakukan untuk mengembangkan kader agar lebih militan dan loyal terhadap masyarakat. Beberapa hasil penelitian mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai GOLKAR, dan Partai Gerindra Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka ikut serta aktif dalam pemilu selama ini telah mengalami peningkatan, atau mengalami keberhasilan dengan menggunakan cara yang dilakukan masing-masing partai dalam memberikan pendidikan politik. Akan tetapi, ketiga partai tersebut masih belum melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat secara konsisten dan berjangka (Ariestino dan Kusriyah, 2017).
- b. Untuk menarik simpati masyarakat, Partai GOLKAR Kabupaten Sragen melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung kemasyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan, kebhinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arah



cara berpolitik yang baik dan benar. Partisipasi Partai GOLKAR dalam pendidikan politik DPD Kabupaten Sragen yaitu dengan cara mengadakan diklat karakter kepada kader partai agar mampu memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat (Wibowo, 2014).

Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan misi partai yaitu menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur. Menurut Kartiko (2018) partai politik memiliki peran sebagai 1) alat untuk mencapai kekuasaan secara demokratis, 2) lembaga kontrol politik, 3) lembaga rekrutmen dan pendidikan kader politik, 4) sarana untuk pendidikan politik rakyat serta komunikasi dan sosialisasi politik, dan 5) lembaga pengemban dan penegak etika dan budaya politik. Melaksanakan pendidikan politik baik bagi kader maupun konstituen yang dilakukan Partai Golkar, artinya Partai Golkar telah melakukan perannya sebagai partai politik. Hal tersebut perlu diapresiasi dengan baik dan dievaluasi, apakah pendidikan politik tersebut dilakukan secara terus menerus atau tidak.

Partai politik lebih intens memberikan pendidikan politik baik untuk kader maupun masyarakat luas pada saat mendekati *event-event* politik seperti PILKADA, PILPRES, dan PEMILU. Begitu juga dengan Partai Golkar, menjelang *event* politik lebih giat melaksanakan pendidikan politik. Beberapa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar baik di daerah maupun pusat menjelang Pemilu 2019, dapat dilihat dalam pemberitaan media *online* sebagai berikut.

1. Golkar Berikan Pendidikan Politik Bagi Kader dan Masyarakat (*harianterbit.com* 16 Januari 2019) dengan tema “Pemantapan Ideologi Kebangsaan dan Kepartaian” di Makassar, 17 Desember 2018.
2. Hadapi Pemilu 2019, DPD II Golkar Malteng Gelar Pendidikan Politik (*intim.new* 22 Des 2019) dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Politik,

Peningkatan Literasi Demokrasi dan Membangkitkan Voluntarisme Politik” di Maluku Tengah, 22 Desember 2018.

3. Fungsionaris Partai Golkar Tekankan Pentingnya Pendidikan Politik Masyarakat (bogor.pojoksatu.id 3 Januari 2019) dengan tema “Pemantapan Ideologi Kebangsaan dan Kepartaian” di Bogor, 23 Desember 2018.
4. Golkar Adakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat (*pedomanbengkulu.com* 25 Januari 2019) dengan tema “Pendidikan Politik Bagi Kalangan Tokoh Masyarakat, Masyarakat Adat, dan Perempuan” di Bengkulu, 25 Januari 2019.
5. DPD Partai Golkar Banyuwangi Gelar Pendidikan Politik (*viva.co.id* 24 Maret 2019) dengan tema “Urgensi Saksi Partai Politik dalam Pemilu 2019” di Banyuwangi, 24 Maret 2019.

Dari pemberitaan media *online* kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar, salah satunya dengan melakukan diskusi yang kemudian hasilnya diberitakan pada media *online*. Adapun bentuk-bentuk pendidikan politik yang dapat dilakukan menurut Kantaprawira (2004) yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
- 2) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- 3) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Kegiatan pendidikan politik seharusnya tidak hanya dilakukan ketika menjelang *event* politik. Pasca *event* politik seperti pemilu, Partai Golkar tetap menggelar pendidikan politik seperti pada pemberitaan media *online* berikut.

1. Pendidikan Politik Partai Golkar 2019 Tekankan Pentingnya Pancasila (*antaranews.com* 28 November 2019)
2. Golkar Berikan Pendidikan Politik Kepada Kader Muda (*radarsurabaya.jawapos.com* 20 Desember 2019)

3. DPD Golkar Kota Tangerang Beri Pendidikan Politik untuk Kader Wanita Milenial (*tangerangtribun.com* 26 Desember 2019)
4. Golkar Kabupaten Malang Berikan Pendidikan Politik Kepada Kaum Milenial (*timesindonesia.co.id* 12 Januari 2020)

Partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi di Indonesia, seharusnya mampu menciptakan lembaga pendidikan politik. Partai politik perlu memiliki lembaga pendidikan politik yang memiliki sistem dan kurikulum yang terstruktur sehingga akan berperan dalam regenerasi kader. Pada tahun 2019, partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto berencana untuk membangun sekolah kader dengan nama *Golkar Academy* seperti diberitakan *beritasatu.com*. Tujuan dari *Golkar Academy* menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yaitu melahirkan kader-kader yang secara kualitas dan kuantitas mumpuni serta siap terjun di bidang legislatif, eksekutif maupun sebagai pengurus partai. Adanya sekolah kader, diharapkan Partai Golkar dapat menciptakan SDM yang unggul. Sekolah kader tersebut perlu adanya, karena Partai Golkar dapat menjangkau, menemai, dan membina kader-kadernya. Hal positif lain yang muncul dengan adanya sekolah kader *Golkar Academy* adalah menunjukkan citra Golkar sebagai partai kader. Urgensi diselenggarakan *Golkar Academy* yaitu mempersiapkan SDM partai yang unggul sekaligus menunjukkan keseriusan partai untuk memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Adanya pendidikan politik yang dilakukan secara intensif oleh partai politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik (Hasanuddin, 2013).

Seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat akan kegiatan politik, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik. Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah '*public policy*'. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi anggota partai. Setiap warga negara berhak untuk bergabung menjadi anggota partai politik. Partai politik merupakan sebuah lembaga yang berhak

untuk melakukan rekrutmen untuk calon pemimpin nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 29 (1) bahwa Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tentu melalui proses kaderisasi dan rekrutmen yang berlaku dalam AD/ART partai politik. AD/ART yang dimiliki Partai Golkar mengenai kaderisasi dan rekrutmen dijelaskan bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan (Farida, 2013). Begitu juga dengan kader Partai Golkar, yang harus mengikuti AD/ART yang dimiliki Partai Golkar.

Kader merupakan ujung tombak dari partai politik hal ini dikarenakan berkembangnya sebuah partai politik bergantung pada kualitas dari kader partai politik itu sendiri. Pengertian kader menurut Yudhoyono (dalam Sahid, 2011) adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
- b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah control organisasi.
- c. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Berdasarkan pengertian kader tersebut, jelas bahwa tidak sembarang orang dapat menjadi kader partai politik. Mengenai keanggotaan dan kader dalam Partai Golkar telah tertulis dalam AD/ART Bab VI sebagai berikut.

1. Pasal 13 (1) Anggota Partai Golkar adalah warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
2. Pasal 14 (1) Kader Partai Golkar adalah anggota partai Golkar yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai.

3. Pasal 15. Setiap anggota berkewajiban untuk 1) menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Golkar; 2) memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Partai Golkar; dan 3) aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai Golkar.
4. Pasal 16. Setiap anggota mempunyai hak 1) Bicara dan memberikan suara; 2) memilih dan dipilih; dan 3) membela diri.

Kader yang dimiliki partai politik tidak hanya bertanggungjawab akan partai politiknya tetapi juga terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, partai politik perlu teliti dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Secara umum, indikator rekrutmen anggota partai politik yaitu sebagai berikut (Pamungkas, 2011).

- a. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi.
- b. Tahap penominasian meliputi ketersediaan '*supply*' calon yang memenuhi syarat dan permintaan '*demand*' dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.

Pada tahap sertifikasi partai politik dapat menentukan kriteria dari seorang anggota partai politik yang dilihat dari latar belakang pendidikan, ideologi, loyalitas, pengalaman berorganisasi, *track record*, dan melakukan *psikotest*. Setelah menentukan kriteria, pada tahap penominasian partai politik berhak memutuskan anggota partai politik yang layak untuk direkrut pada posisi tertentu. Setiap partai politik harus memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL), sehingga dapat terlihat konsistensinya dalam perkaderan. Perkaderan diharapkan bukan hanya sebagai formalitas tetapi memiliki dampak positif bagi kader dan partai politik. Jenjang karir yang jelas dalam partai politik dapat memudahkan dalam pembinaan kader di setiap tingkatan. Sehingga pada tahap penominasian partai politik dapat dengan mudah memutuskan kader yang dinominasikan pada suatu jabatan. Penominasian dapat dilakukan partai politik dalam menentukan kadernya yang layak memimpin partai mulai dari tingkat DPC hingga DPP, bahkan untuk menduduki jabatan setingkat Menteri, mengikuti proses pemilihan calon anggota legislatif, serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses rekrutmen

politik, partai politik memiliki beberapa pilihan adalah sebagai berikut(Pahlevi, 2013).

- 1) Partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- 2) *Compartmentalization*, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
- 3) *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang yang akan direkrut.
- 4) *Civil Service Reform*, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting.

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang paling ideal dalam perkaderan. Partai Golkar aktif dalam pembinaan kadernya dimulai dari tingkat cabang hingga ke pusat. Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen kader salah satunya melalui organisasi sayap yang dimiliki. Partai Golkar dapat dengan mudah mengetahui latar belakang pendidikan, ideologi, loyalitas, pengalaman berorganisasi, serta *track record* calon kader yang diambil dari organisasi sayap Partai Golkar. Untuk keterbukaan rekrutmen anggota dan kader Partai Golkar untuk umum tidak begitu jelas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya informasi secara luas baik melalui media cetak, *online*, dan *official website* Partai Golkar mengenai rekrutmen anggota dan kader Partai Golkar. Lain hal dengan rekrutmen untuk calon anggota legislatif, Partai Golkar melalui Dewan Pimpinan Daerah melakukan rekrutmen caleg secara terbuka. Anggota legislatif merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Partai Golkar berusaha mengantarkan kader terbaiknya dalam menduduki jabatan kepemimpinan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan Partai Golkar terdapat dalam rekrutmen caleg terdapat pemberitaan media *online* sebagai berikut.

1. Golkar Badung Bentuk Tim Verifikasi Rekrutmen Caleg (*fajarbali.com* 10 Mei 2018)

2. Golkar Bahas Sistem Rekrutmen Bakal Caleg 2019 (*suara.com* 21 Mei 2017)
3. Golkar Sumbar *Roadshow* Sosialisasi Rekrutmen Bacaleg (*jurnalsumbar.com* 20 Maret 2018)

Selain rekrutmen caleg, rekrutmen calon kepala daerah juga dilakukan partai Golkar secara terbuka. Hal ini dilakukan sebagai upaya partai Golkar untuk mendapatkan calon terbaik yang akan diusungnya. Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, Partai Golkar membuka kesempatan seluas-luasnya baik bagi kader partai maupun di luar kader partai. Akan tetapi, Partai Golkar tetap mengutamakan kadernya untuk diusung maju dalam pemilihan kepala daerah. Proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan Partai Golkar tersebut berdasarkan Surat DPP Partai Golkar SE-28/GOLKAR/VI/2019. Beberapa DPD Golkar yang telah melakukan rekrutmen calon kepala daerah terlihat dalam pemberitaan *online* berikut ini.

1. Golkar Jatim Gelar Rekrutmen Untuk Pilgub Jatim (*skalanews.com* 27 Februari 2018)
2. DPD Partai GOLKAR Karo Buka Pendaftaran (*tuntasonline.com* 11 Oktober 2019)
3. Golkar Simalungun Buka Pendaftaran Balon Kepala Daerah (*faseberita.id* 11 November 2019)
4. Golkar Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 (*suarapemredkalbar.com* 4 Desember 2019)
5. Golkar Buka Penjaringan Pilgub (*jamberita.com* 7 Februari 2020)

Kepemimpinan nasional lainnya yang dipilih oleh rakyat melalui pencalonan yang dilakukan partai politik yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yaitu pada tahun 2004, Partai Golkar mengadakan konvensi Calon Presiden. Hal tersebut dilakukan Partai Golkar sebagai upaya untuk menjaring kader terbaik Partai Golkar sebagai Calon Presiden. Konvensi ini diikuti 5 orang politisi senior Partai Golkar, yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Wiranto sukses memenangkan Konvensi Calon Presiden

Partai Golkar. Pada Pilpres 2004, Wiranto berpasangan dengan Solahudin Wahid dan Partai Golkar sebagai partai pengusung utama. Pada Pilpres tahun 2009, Partai Golkar juga mengusung sendiri kadernya untuk menjadi calon Presiden yaitu Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar sebagai partai terbesar saat itu perlu menjaga harkat partai, sehingga harus memiliki Calon Presiden. Jusuf Kalla saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, diusulkan para kader untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2009 berpasangan dengan Wiranto. Namun pada tahun 2014 dan 2019, Golkar tidak mengusung kadernya sebagai Calon Presiden. Bahkan di tahun 2019, tidak ada satupun kader Partai Golkar menjadi Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. Dilihat dari perolehan suara, Partai Golkar memang mendapat posisi 3 besar suara terbanyak akan tetapi hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi Partai Golkar untuk mencalonkan sendiri kadernya. Salah satu yang menjadi alasan Partai Golkar tidak dapat mengusung calonnya sendiri yaitu Partai Golkar tidak mendapatkan 20% jumlah kursi DPR sehingga tidak memenuhi *presidential threshold* sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain. Tidak munculnya kader Partai Golkar di bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden di antara mitra koalisi, karena kader Partai Golkar dinilai belum memiliki popularitas untuk dicalonkan. Adanya ambang batas dalam sistem pemilihan di Indonesia, dapat mengakibatkan satu calon diusung oleh beberapa partai politik, sehingga membatasi calon untuk muncul.

Ketidakhadiran kader Partai Golkar di kontes pemilihan kepemimpinan nasional harus menjadi cambuk bagi Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen kader. Salah satu yang perlu Partai Golkar lakukan adalah dengan adanya keterbukaan dalam rekrutmen. Keterbukaan rekrutmen di Partai Golkar memberi nilai positif bagi partai, soliditas partai dibangun mulai dari tingkat bawah sehingga dapat meningkatkan elektabilitas partai. Partai politik tidak memiliki perencanaan karir sebagai politisi dalam manajemen sumber daya manusia nya. Dalam partai politik tidak ada batasan waktu dan kriteria kapan seorang anggota partai politik menjadi seorang kader kemudian menjadi ketua DPC, DPD, hingga DPP. Untuk mengakomodasi kader-kader partai politik mulai dari tingkat bawah



partai politik dapat memilih proses rekrutmen partisan, yaitu pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis (Pahlevi, 2013).

Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode merupakan salah satu kader Partai Golkar yang merintis karirnya dari bawah. Mengawali karir dari DPD II Partai Golkar Purwakarta, Dedi Mulyadi sukses menjadi anggota DPRD dan pernah menjabat sebagai ketua DPD II Partai Golkar Purwakarta. Diusung Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Purwakarta, Dedi Mulyadi dicalonkan sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Lily Hambali. Pada pemilihan selanjutnya Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai Bupati dan sukses memenangkan Pilkada Purwakarta sebanyak dua kali. Sukses menjadi Bupati Purwakarta, karirnya di Partai Golkar juga melesat yaitu menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat. Berbekal kemampuannya memimpin Purwakarta, Dedi Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilgub Jabar 2018. Meski sempat Partai Golkar mengusung nama lain di Pilgub Jabar, pada akhirnya Partai Golkar mencalonkan kader terbaiknya untuk bertarung yaitu Dedi Mulyadi. Mengalami kekalahan di Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi tetap berjuang untuk aspirasi rakyat Jawa Barat dengan mengikuti Pileg 2019 dari Dapil VII Jabar. Mantan Bupati Purwakarta tersebut sukses meraih suara terbanyak di antara caleg Partai Golkar se Indonesia. Karirnya di Partai Golkar semakin menanjak, ia dipercaya sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan.

Jenjang karir kader partai politik berbeda dengan jenjang karir di instansi pemerintahan. Karir politik kader partai tidak harus dari awal, mulai DPC hingga DPP tetapi ada memang kader yang berangkat dari bawah. Tetapi ada juga orang tertentu yang dibutuhkan partai politik tidak mulai dari bawah. Jenjang karir dalam parpol dapat diperoleh melalui kedekatan dan keberuntungan. Partai politik berbeda dengan organisasi lain misalkan Ormas Islam Muhammadiyah atau organisasi mahasiswa seperti BEM, yang memang bisa fokus melihat mulai dari perkaderan tingkat bawah hingga pusat. Tetapi walaupun demikian pengalaman memimpin menjadi sesuatu hal yg tidak bisa ditawar lagi dalam karir partai politik. Partai politik belum memiliki sistem kaderisasi dan rekrutmen yang

jasas seperti dalam sistem birokrasi ataupun TNI dan POLRI. Dalam sistem birokrasi ataupun TNI dan POLRI, setiap individu yang akan menduduki sebuah jabatan atau mendapatkan kenaikan pangkat perlu mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Sebelum mengikuti pendidikan ada seleksi terlebih dahulu, sehingga orang-orang terpilih tentu layak dan mampu mengikuti pendidikan. Selain itu, hirarki jabatan dalam sistem birokrasi ataupun TNI dan POLRI memiliki tahapan yang jelas. Sehingga individu yang memegang jabatan di dalam birokrasi, TNI, dan POLRI merupakan orang yang layak menduduki jabatan. Partai politik perlu mencontoh proses rekrutmen yang terstruktur dalam sistem birokrasi, TNI, dan POLRI. Partai politik perlu memiliki perencanaan bagi karir politisi yang dapat dimulai dari jenjang pengurus anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus cabang, pengurus daerah hingga pengurus pusat. Apabila proses kaderisasi dan rekrutmen dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkatan paling bawah hingga pusat, maka partai politik akan mampu melakukan rekrutmen dalam setiap tingkatan bahkan untuk tingkat nasional. Dengan demikian proses regenerasi dalam internal partai politik maupun sistem pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya.

Rekrutmen dalam partai politik salah satunya didominasi oleh kerabat dekat atau keluarga dari pimpinan partai politik. Tidak sedikit keluarga yang terjun ke dalam dunia politik dengan mengekor ketokohan dari pimpinan partai politik atau penguasa daerah. Bentuk kekerabatan politik dalam rekrutmen lebih dikenal dengan dinasti politik. Dinasti politik ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana para kepala daerah di sebuah provinsi dapat terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan keluarga. Masyarakat Indonesia masih memiliki kekerabatan yang kuat, sehingga dapat mempengaruhi pilihan politik suatu kelompok. Kuatnya ikatan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia dapat berperan melahirkan politik dinasti dalam partai politik dan pemerintahan daerah. Proses rekrutmen anggota keluarga dikhawatirkan hanya sebagai perpanjangan kekuasaan dari seorang pejabat daerah ataupun pimpinan partai. Merekrut keluarga untuk mengisi jabatan politis seharusnya tidak menjadi sebuah masalah, selagi masih ada asas proporsionalitas. Lebih lagi jika keluarga yang direkrut

memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan politis tersebut. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa keluarga yang akan masuk ke dalam partai politik tetap mengikuti proses kaderisasi. Sehingga sudah mempunyai kapabilitas untuk melanjutkan kepemimpinan. Rekrutmen anggota keluarga dapat dikategorikan *Civil Service Reform*, yaitu proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting.

Partai Golkar sebagai partai yang sudah lama berdiri melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah politik di Indonesia. Tidak sedikit anak atau keluarga dari tokoh yang dilahirkan Partai Golkar terjun dalam dunia politik. Jenjang karir di partai politik masih dipengaruhi salah satunya hubungan kedekatan. Di Partai Golkar masih terdapat nepotisme akan tetapi tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan. Anak atau keluarga yang meneruskan kepengurusannya di Partai Golkar telah melalui perkaderan dan merupakan pengurus aktif. Sebagai contoh beberapa anak dari petinggi Partai Golkar yang saat ini aktif di Partai Golkar dan menjadi anggota legislative dari Partai Golkar adalah sebagai berikut.

1. Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan RI) merupakan anak dari Theo L. Sambuaga (Ketua DPP Partai Golkar Tahun 1998). Jerry Sambuaga pernah aktif dan menjadi Wakil Ketua Umum di DPP AMPI pada tahun 2017. Di Partai Golkar, Jerry Sambuaga pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal. Jerry merupakan salah satu representasi kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.
2. Dave Akbarshah Fikarno (Anggota DPR 2019-2024 Fraksi Partai Golkar) merupakan anak dari Agung Laksono (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004 dan 2009), ia pernah menjadi Ketua Umum DPP AMPI periode 2010-2015. AMPI merupakan salah satu organisasi sayap Partai Golkar.
3. Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR RI periode 2019-2024 merupakan anak dari Ade Komarudin (Ketua DPR RI, Politikus senior Partai Golkar). Putri Komarudin pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Ekonomi

dan Keuangan Negara DPP AMPI serta Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar.

Beberapa contoh tersebut, jelas bahwa Partai Golkar tidak hanya melihat hubungan kekerabatan tapi juga melalui kaderisasi salah satunya melalui organisasi sayap yang dimiliki Partai Golkar yaitu AMPI. Meskipun memiliki hubungan kekerabatan, anak dari petinggi Partai Golkar harus berkontribusi dengan aktif menjadi kader Partai Golkar. Selain itu, melihat latar belakang pendidikan jelas bahwa mereka memiliki kemampuan dan kualitas untuk menjadi politikus Partai Golkar. Nilai-nilai yang ditanamkan orangtua sebagai petinggi Partai Golkar sejak dini menjadi nilai tambah bagi anak untuk mencintai dan membangun bersama Partai Golkar.

Partai politik dapat melakukan rekrutmen terhadap orang yang baru bergabung untuk langsung memiliki jabatan tinggi dalam partai politik. Hal tersebut sah saja untuk dilakukan, akan tetapi perlu memerhatikan *track record* dari individu yang mengikuti *talent scouting*. Rekrutmen ini dapat dikategorikan dalam *Compartmentalization*, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Partai Golkar pernah melakukan *talent scouting* dalam merekrut kadernya. Beberapa tokoh yang ditetapkan menjadi kader partai Golkar melalui proses *talent scouting* antara lain sebagai berikut.

1. Lodewijk freidrich paulus. Nama Lodewijk Freidrich Paulus di dunia militer sudah tidak asing lagi, beliau pension dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI pada tahun 2015. Namun, di dunia politik namanya masih asing terdengar. Sebagai pemain baru di partai politik, karirnya termasuk moncer hingga dapat menduduki jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Lodewijk Freidrich Paulus, termasuk salah satu kader partai yang melalui proses *talent scouting* melihat kemampuannya saat di militer. Setahun pasca pensiun dari TNI yaitu tahun 2016 beliau dipercaya Partai Golkar untuk ditugaskan menjabat Plt. Ketua DPD Golkar Lampung. Saat itu kondisi DPD Golkar Lampung sedang memanas dan kehadiran Loedwijck diharapkan dapat meredam gejolak yang. Hal ini

bukan tanpa sebab, Loedwijk pernah menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan sehingga dianggap berpengalaman dan memiliki pengaruh terhadap DPD Golkar Lampung.

2. Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode. Dalam proses menjadi Gubernur, dua partai yang menjadi afiliasi politiknya yaitu Partai Bulan Bintang pada tahun 2004 – 2011 dan Partai Demokrat pada tahun 2011 – 2018. Pasca mundur dari Partai Demokrat, TGB menyatakan bergabung dengan Partai Golkar. Hal tersebut disambut baik oleh Partai Golkar, dan langsung mendapatkan dua jabatan penting. Pada awal bergabungnya di Partai Golkar TGB ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar serta Wakil Ketua Badan Pemenanga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden DPP Golkar.
3. Hasan Basri Agus (HBA) merupakan Gubernur Jambi periode 2010 – 2015. Pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2010 hingga 2017, HBA tercatat sebagai kader Partai Demokrat bahkan menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi. Mengawali karir sebagai PNS hingga terjun ke dunia politik, karir Hasan Basri Agus terbilang sukses. Banyak penghargaan yang diperolehnya baik secara pribadi maupun instansi yang dipimpinnya. Namun saat pemilihan Gubernur Jambi pada tahun 2016, beliau mengalami kekalahan sehingga tidak terpilih kembali. Sempat rehat dari dunia politik, pada tahun 2017 Partai Golkar memining Hasan Basri Agus menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar dan mencalonkannya sebagai anggota legislatif Dapil Jambi. Keputusan Partai Golkar memining HBA membuahkan hasil positif yaitu HBA mendapatkan suara terbanyak kedua se-Indonesia di Partai Golkar, setelah Dedi Mulyadi (mantan Bupati Purwakarta) dari Dapil Jawa Barat VII. Partai politik memilih profesi artis dan pengusaha serta orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik dalam melaksanakan *talent scouting*. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang merekrut para artis sebagai calon anggota legislatif.

Proses *talent scouting* yang dilakukan Partai Golkar mengacu pada AD/ART Partai Golkar. Pada AD/ART mengenai Kader pasal 5(2) yaitu Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.

Kebanyakan partai politik di Indonesia memilih proses *immediate survival* pada proses rekrutmennya, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan yang di rekrut. Alih-alih membenahi sistem kaderisasi dan rekrutmen, kebanyakan partai politik melakukan perkaderan instan. Perkaderan instan ini dilakukan atas dasar kepentingan partai yaitu popularitas dan biaya yang dibutuhkan partai politik dalam menghadapi *event* politik seperti Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut menjadi jalan pintas bagi partai politik untuk meraih suara rakyat dengan biaya yang bisa ditekan. Profesi artis seringkali menjadi incaran partai politik sebagai calon kader yang akan direkrut. Artis sudah memiliki modal politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Mencalonkan artis sebagai anggota legislatif tidak salah, akan tetapi perlu dilihat kembali bagaimana *track record* dari para artis tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan besar untuk sebagian orang yaitu apakah para artis tersebut mampu untuk mengemban amanah sebagai anggota legislatif. Selain merekrut artis, partai politik juga merekrut para pengusaha. Banyaknya pengusaha yang direkrut oleh partai politik, dapat dilihat pada gambar berikut. Partai politik merekrut pengusaha tentu bukan tanpa alasan, ada kepentingan partai di dalamnya. Kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dengan bergabungnya para pengusaha dalam partai politik diharapkan dapat membantu keuangan partai. Para pengusaha ini tentu mempunyai kepentingan ketika bergabung dengan partai politik, yang bisa saja tidak sejalan dengan tujuan partai politik. Hal ini tentu dapat mempengaruhi arah dan tujuan dari partai politik.

Model perekrutan yang dilakukan partai politik seperti merekrut artis atau pengusaha dalam rumus demokrasi tidak ada yang salah. Demokrasi yang ditentukan oleh suara terbanyak berbeda dengan demokrasi model perwakilan. Partai politik tidak bisa sepenuhnya kader, masa, atau ideologi karena dapat rusak.

Partai politik membutuhkan ketiganya secara proporsional. Rekrutmen artis dan pengusaha dalam partai politik boleh saja dilakukan tetapi harus mengikuti perkaderan. Di beberapa partai politik terutama partai besar walaupun sebagai pendongkrak suara artis/pengusaha tidak bisa masuk begitu saja tanpa melalui perkaderan. Partai sebagai organisasi, jika ingin menjadi organisasi yang baik perlu taat aturan, mekanisme termasuk dalam rekrutmen kader. Rekrutmen artis dalam partai biasanya mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah asal daerah. Jika suara partai politik di daerah tersebut sudah kuat, dan kemungkinan mendapat kursi biasanya tidak lagi perlu merekrut artis.

Menjadikan artis sebagai *vote getter* dalam Pemilu sah saja dilakukan partai politik, namun Partai Golkar lebih mengutamakan mengusung kader partai di Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat dalam pemberitaan *online* di laman *sindonews.com* disebutkan bahwa Golkar Jabar tak gentar hadapi caleg artis pada Rabu (25/07/2018). Akan tetapi bukan berarti Partai Golkar tidak mengusung artis pada Pemilu 2019. Seperti diketahui Partai Golkar mengusung 2 orang artis sebagai caleg di Pemilu 2019 yaitu Nurul Arifin dan Teti Kadi. Namun kedua artis tersebut, tidak secara *instan* direkrut Partai Golkar jelang Pemilu 2019. Kiprah Nurul Arifin di Partai Golkar sudah tidak diragukan lagi, ia pernah menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Selain itu, ia pernah mencalonkan diri sebagai Walikota di Pilkada Kota Bandung yang diusung oleh Partai Golkar. Artis Teti Kadi, walaupun tidak lolos sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019, ia pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar periode 2014-2015. Teti Kadi memulai karir politiknya melalui Partai Golkar dan terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat pada Pemilu 2014, serta menduduki jabatan penting yaitu Wakil Ketua Komisi B. Melihat kiprah artis yang diusung Partai Golkar dalam Pemilu 2019, jelas bahwa Partai Golkar tidak hanya ingin meraup suara dengan merekrut artis. Partai Golkar mengusung artis yang memang merupakan kader Partai Golkar dan berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan pemberitaan di media *online indopos.com* dengan judul berita "Golkar Klaim Caleg Artisnya Paling Berkualitas" yang di *publish* pada tanggal 19 Juli 2018.

Tahapan rekrutmen anggota dan kader partai politik merupakan tahapan awal dalam terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya regenerasi dalam partai politik. Partai politik perlu menyiapkan kadernya sehingga memiliki kualitas sebagai calon pemimpin nasional. Selain memberikan pendidikan politik pada kadernya, partai politik juga dapat memberlakukan sistem *reward and punishment*. Adanya sistem *reward and punishment* diharapkan kader-kader partai yang memiliki prestasi yang baik akan terus melaju, sedangkan kader yang melanggar aturan dengan sendirinya akan terkena seleksi alam. Konsistensi partai politik dalam menerapkan sistem *reward and punishment* perlu dijaga. Sehingga kader partai politik yang dihasilkan oleh partai politik merupakan kader-kader terbaik yang akan berjuang sesuai pengertian partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Sistem *punishment* bagi kader Partai Golkar yang melanggar hukum sudah dilakukan yaitu dengan tidak memberi bantuan hukum hingga pemecatan pada kader yang bersangkutan. Di Partai Golkar pada prinsipnya siapapun yang melanggar ketentuan dalam AD/ART akan ada sanksinya. Sanksi dijatuhkan setelah ada ketetapan hukum terhadap kader yang bersangkutan. Beberapa pemberitaan media *online* mengenai *punishment* yang dilakukan Partai Golkar adalah sebagai berikut.

1. Ini Alasan Sebenarnya Mengapa Fadel Muhammad Dipecat Dari Golkar (*republika.co.id* 14 November 2016)
2. Kasus Suap dari Meikarta, Golkar nonaktifkan Bupati Bekasi dari Partai (*kontan.id* 16 Oktober 2018)
3. Kadernya Jadi Tersangka KPK, Partai Golkar Tak Beri Bantuan Hukum (*kompas.com* 29 Maret 2019)
4. Golkar Pecat Kader Belot ke Duet Prabowo-Sandi, Agung Laksono: Langkah Baik (*timesindonesia.co.id* 20 Maret 2019)

Salah satu sanksi yang diberikan pada kader Partai Golkar yaitu pemberhentian. Adapun pemberhentian anggota dijelaskan dalam AD/ART Partai Golkar Bab II pasal 4 sebagai berikut.



1. Anggota berhenti karena 1) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 2) diberhentikan; dan 3) meninggal dunia.
2. Anggota diberhentikan karena 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota; 2) menjadi anggota partai politik lain; 3) melanggar AD, ART, dan atau keputusan musyawarah nasional, dan atau rapat pimpinan nasional; 4) melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan partai.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam peraturan organisasi.

Selain sistem *punishment* Partai Golkar juga memberikan *reward* kepada kadernya yang berprestasi. Memberikan *reward* kepada kader partai yang berprestasi merupakan bentuk penghargaan dari partai, selain itu hal tersebut dapat menambah loyalitas dan soliditas Partai Golkar. Beberapa pemberitaan media *online* mengenai penghargaan yang diberikan Partai Golkar kepada kadernya yaitu sebagai berikut.

1. Ketua DPRD Yahukimo, Mari Mirin: Saya Terpilih Karena Loyalitas, Dedikasi, dan Prestasi (*jubi.co.id* 15 Desember 2016)
2. Raih Suara Terbanyak Kedua se-Indonesia di Partai Golkar, HBA Dianugerahi Medali Platinum (*jamberita.com* 16 September 2019)
3. Prestasi Gemilang Partai Golkar Karanganyar di bawah Pimpinan Yuliatmono (*beritalima.com* 30 Oktober 2019)
4. HUT Ke-55, Golkar Beri Penghargaan Khusus Karya Utama ke JK (*detik.com* 6 November 2019)
5. Berprestasi dalam Pemilu, DPP Partai Golkar Beri Penghargaan Kepada DPD I NTT (*indonesiasatu.co* 9 November 2019)
6. Dipimpin Rohidin Mersyah Golkar Bengkulu Sandang Penghargaan Terbaik (*bengkuluinteraktif.com* 12 November 2019)
7. Airlangga Dinilai Berhasil Menempatkan Kader Terbaik di Kabinet (*detak-palembang.com* November 2019)

Dari analisis ini menggambarkan bahwa Partai Golkar berusaha melakukan kaderisasi dan rekrutmen partai politik sesuai dengan AD/ART. Namun masih

terdapat beberapa kekurangan diantaranya belum memiliki perencanaan karir sebagai politisi untuk kadernya serta sistem pendidikan politik yang belum terstruktur. Partai Golkar juga tidak hanya mempertimbangkan popularitas seseorang ketika akan dicalonkan untuk mengisi jabatan politis, akan tetapi Partai Golkar mengutamakan loyalitas dari kadernya. Partai Golkar tidak dapat lepas dari nepotisme, hal tersebut ditandai dengan munculnya beberapa kader Partai Golkar yang merupakan anak atau keluarga dari petinggi partai. Akan tetapi, anak atau keluarga yang bergabung di Partai Golkar tetap mengikuti perkaderan salah satunya melalui organisasi sayap yang dimiliki Partai Golkar. Partai Golkar juga tidak hanya mencari suara saja dalam pemilihan. Hal tersebut terlihat dari tidak banyak menjadikan artis sebagai *vote getter* dalam Pemilu atau Pilkada.

Kaderisasi dan rekrutmen tidak hanya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, proses tersebut dilakukan untuk perkembangan partai politik dalam jangka panjang. Perlu menjadi perhatian utama dari partai politik yaitu seleksi kader dan pendidikan setelah kader ikut bergabung dengan partai politik. Pendidikan dan pembinaan kader tidak dilakukan pada saat akan dilaksanakan kegiatan pemilihan umum, akan tetapi pendidikan dan pembinaan kader perlu dilakukan secara terus menerus. Kader sebagai sumber daya manusia yang dimiliki partai politik perlu menjadi prioritas utama. Partai politik yang berfungsi memberikan pendidikan politik harus mampu menjadi lembaga pendidikan bagi kadernya ataupun masyarakat luas. Melalui cara ini diharapkan semua kader partai politik baik yang lama maupun yang muda memiliki kualitas yang baik. Sehingga proses regenerasi kader dalam partai dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

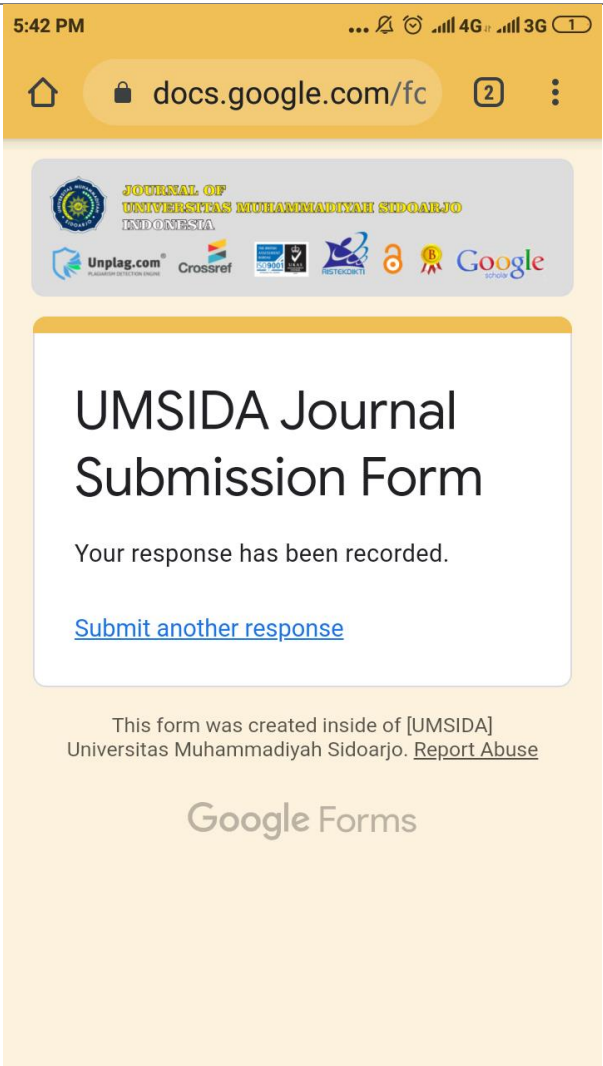
Strategi yang dilakukan partai politik dalam rangka proses regenerasi dan mengisi kepemimpinan nasional yaitu dengan rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan kader-kader politik. Partai politik harus memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam perkaderan, sehingga dapat terlihat konsistensinya dalam perkaderan. Partai politik dapat melakukan rekrutmen kader secara langsung maupun *talent scouting*. Perkaderan tidak berhenti sampai proses rekrutmen, partai politik perlu menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan politik. Partai politik perlu memiliki lembaga pendidikan politik yang memiliki sistem dan kurikulum yang terstruktur sehingga akan berperan dalam regenerasi kader. Menerapkan sistem *reward and punishment*, sehingga terjadi seleksi alam terhadap para kader. Beberapa hal yang dapat dilakukan partai politik dalam menentukan kadernya untuk menduduki jabatan publik atau kepemimpinan nasional yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap semua kader dengan model *scoring*.
2. Memperkenalkan calon ke konstituen dan melihat responnya, baik dengan *sample* maupun dilakukan secara serius lewat lembaga survei.
3. Mengambil profesional yang merepresentasikan partai walaupun bukan kader partai.

## BAB 6 LUARAN YANG DICAPAI

Jurnal

### IDENTITAS JURNAL

1	Nama Jurnal	JBMP
2	Website Jurnal	http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jbmp/index
3	Status Makalah	Submitted
4	Jenis Jurnal	Jurnal Nasional terakreditasi
4	Tanggal Submit	8 April 2020
5	Bukti Screenshot submit	

# IDENTITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

<b>1</b>	Nama Karya	Strategi Perkaderan Partai Politik dalam Regenerasi Kepemimpinan Nasional
<b>2</b>	Jenis HKI	Hak Cipta
<b>3</b>	Status HKI	Draft
<b>4</b>	No Pendaftaran	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;"><b>SURAT PERNYATAAN</b></p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Jakarta, 1 Mei 2020</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:  Nama : I. Rahman Habibi  Kewarganegaraan : Indonesia  Alamat : Jalan Komud Serpong V E. 154 Komud Serpong Jakarta Pusat</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Materai 6.000,- (Rahman Habibi) Pemegang Hak Cipta</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karya Cipta yang saya mohonkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama : Strategi Perkaderan Partai Politik dalam Regenerasi Kepemimpinan Nasional</li> <li>b. Jumlah : 1 (satu) eksemplar</li> </ul> </li> </ol> <p>* Semua pemegang hak cipta sgn menandatangani di atas materai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyuksun atau sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);</li> <li>• Bukan merupakan Eksepsi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;</li> <li>• Bukan merupakan Ciptaan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;</li> <li>• Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;</li> <li>• Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda berbeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, jabatan, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan;</li> <li>• Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma sosial, kelestarian umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Hak Cipta.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebagai pemohon mempunyai keahlian untuk menjamin isi karya ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan akibat dituntutkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa sengketa maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.</li> <li>4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya kanti melanggar, maka saya i kanti bersedia secara sukarela dan/atau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memohonkan karya cipta yang saya ajukan ditanggapi ditinjau kembali; atau</li> <li>b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dibatalkan esensial dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Dalam hal kepemilikan hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam beperkara dan/atau sedang dalam sengketa di Pengadilan maka status kepemilikan surat pendaftaran elektronik tersebut ditanggapi menanggapi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</li> </ol> </li> </ol> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Demikian Surat pernyataan ini sayaikatkan buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> </div>

## BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT DAN PROYEKSI HILIRISASI

Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini merupakan gambaran awal untuk melihat strategi yang dilakukan partai politik dalam proses regenerasi kepemimpinan nasional. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Partai politik dapat menerapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dalam proses rekrutmen, pendidikan politik, dan pembinaan kader partai politik. Riset lanjutan yang dapat dilakukan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil regenerasi kepemimpinan sebelum dan sesudah diterapkan hasil penelitian berupa proses rekrutmen, pendidikan politik, dan pembinaan kader-kader. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, minimal 5 tahun yaitu pada saat proses pemilihan kepemimpinan nasional.</p>
Rencana Tindak Lanjut	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dipenelitian telah di submit dalam Jurnal Nasional Sinta 3. Hasil penelitian akan disampaikan pada pihak berkaitan terutama yang menjadi sampel dalam penelitian, sebagai bahan masukan untuk kemajuan organisasi. Untuk tahap selanjutnya peneliti akan lebih fokus dalam manajemen sumber daya manusia terutama dalam bidang kepemimpinan. Penelitian berikutnya lebih mengarah kepada kepemimpinan di generasi milenial. Saat ini generasi milenial mulai memasuki kancah kepemimpinan nasional. Generasi milenial perlu dipersiapkan untuk menduduki kepemimpinan nasional dan diharapkan membawa perubahan bagi Indonesia. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepemimpinan di generasi milenial sebagai penerus estafet tongkat kepemimpinan nasional di Indonesia.</p>

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, R. C. (2008). *Pengembangan SDM partai politik: Rekrutmen dan kaderisasi di Partai Golkar*. [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. ed. revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin & Nasiwan. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Penerbit: Ombak.
- Creswell, J.W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. Edisi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhesinta, W. S. (2016). Calon tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan konsep demokrasi. *Jurnal Cita Hukum*, 4 (1), 87-104.
- Farida. (2013). Mekanisme penggantian antar waktu (paw) anggota DPR dan implikasinya dalam konsep perwakilan rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 197-214.
- Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan dan tantangan partai politik baru pada pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 15(2), 197-213.
- Haris dkk. (2016). *Panduan rekrutmen & kaderisasi partai politik ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepkatan Pencegahan, KPK Bekerja sama dengan P2Politik LIPI.
- Hasanuddin. (2013). Pelaksanaan sistem kaderisasi partai golkar di Kota Pekanbaru tahun 2011-2013.
- Hiryanto, dkk. (2015). Pengembangan model pelatihan kepemimpinan bagi organisasi kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(2), 81-89.
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika partai politik di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem politik Indonesia: Suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kartiko, K. H. (2018). *Sistem politik di Indonesia*. Disampaikan sebagai materi ajar di Lemhannas.

- Koirudin. (2004). *Partai politik dan agenda transisi demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makhfudz, M. (2018). Seleksi pemimpin nasional melalui proses demokrasi. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5(1), 47-64.
- Mazawi, A. R. (2017). Dinamika partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6 (2), 137-155.
- Natalia, A. (2015). Peran partai politik dalam mensukseskan pilkada serentak di Indonesia tahun 2015. *Jurnal TAPIS*, 11 (1), 46-68.
- Nursal & Awza. (2017). Peran pimpinan dalam kaderisasi cabang (DPC) partai demokrat kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4(2), 1-14.
- Pahlevi, I. (2013). Daftar calon sementara Pemilu 2014 dan proses pengkaderan partai politik. *Info Singkat*, 5(1), 17-20.
- Pamungkas. (2011). *Partai politik teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarisme.
- Pokja Kepemimpinan Lemhannas. (2018). *Kepemimpinan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Rivai. (2009). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 9 (2), 57-65.
- Stephanie, M. (2014). Relationship maintenance strategies pemimpin partai politik peserta pemilihan umum 2014 melalui website. *Jurnal E-komunikasi*, 2(3), 1-12.
- Sumadinata, W.S. (2016). Dinamika koalisi partai-partai politik di Indonesia menjelang dan setelah pemilihan presiden tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 183-188.
- Wibowo. (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.



Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014  
Tentang Tata Tertib.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan  
Wakil Presiden

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar

<https://kbbi.web.id/regenerasi> diakses pada Oktober 2019

<https://harianterbit.com/read/103014/Golkar-Berikan-Pendidikan-Politik-Bagi-Kader-dan-Masyarakat> diakses pada Februari 2020

<http://intim.news/2019/12/hadapi-pemilu-2019dpd-ii-golkar-malteng-gelar-pendidikan-politik/> diakses pada Februari 2020

<https://bogor.pojoksatu.id/baca/fungsionaris-partai-golkar-tekankan-pentingnya-pendidikan-politik-masyarakat> diakses pada Februari 2020

<https://pedomanbengkulu.com/2019/01/golkar-adakan-pendidikan-politik-bagi-masyarakat/> diakses pada Februari 2020

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/1133306-dpd-partai-golkar-banyuwangi-gelar-pendidikan-politik> diakses pada Februari 2020

<https://antaranews.com/berita/1185140/pendidika-politik-partai-golkar-2019-tekankan-pentingnya-pancasila> diakses pada Februari 2020

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/12/20/171137/golkar-berikan-pendidikan-politik-kepada-kader-muda> diakses pada Februari 2020

<http://www.tangerangtribun.com/dpd-golkar-kota-tangerang-beri-pendidikan-politik-untuk-kader-wanita-milenial/> diakses pada Februari 2020

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/246540/golkar-kabupaten-malang-berikan-pendidikan-politik-kepada-kaum-milenial> diakses pada Februari 2020

<https://fajarbali.com/politik/1720-golkar-badung-bentuk-tim-verifikasi-rekrutmen-caleg> diakses pada Februari 2020

<https://suara.com/news/2017/05/21/144723/golkar-bahas-sistem-rekrutmen-bakal-caleg-2019-di-rapimnas> diakses pada Februari 2020

<https://jurnalsumbar.com/2018/03/golkar-sumber-road-show-sosialisasi-rekrutmen-bacaleg/>diakses pada Februari 2020

<https://skalanews.com/read/303537>diakses pada Februari 2020

<https://www.tuntasonline.com/2019/11/10/dpd-partai-golkar-karo-buka-pendaftaran>diakses pada Februari 2020

<https://faseberita.id/berita/golkar-simalungun-buka-pendaftaran-balon-kepala-daerah>diakses pada Februari 2020

<https://suarapemredkalbar.com/berita/bengkayang/2019/12/04/golkar-buka-pendaftaran-calon-kepala-daerah-pilkada-2020>diakses pada Februari 2020

<https://jamberita.com/read/2020/02/07/5956749/golkar-buka-penjarangan-pilgub-tim-cagub-langsung-pasang-kuda-kuda>diakses pada Februari 2020

<https://jabar.sindonews.com/read/115/1/golkar-jabar-tak-gentar-hadapi-caleg-artis-1532495248>diakses pada Februari 2020

<https://indopos.co.id/read/2018/07/19/144641/golkar-klaim-caleg-artis-paling-berkualitas>diakses pada Februari 2020

<https://nasional-republika.co.id/berita/oglzsv396/ini-alasan-sebenarnya-mengapa-fadel-muhammad-dipecat-dari-golkar>diakses pada Februari 2020

<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-suap-dari-meikarta-golkar-nonaktifkan-bupati-bekasi-dari-partai>diakses pada Februari 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/07475621/kadernya-jadi-tersangka-kpk-partai-golkar-tak-beri-bantuan-hukum>diakses pada Februari 2020

<https://www.timeindonesia.co.id/read/206225/20190320/223311/golkar-pecat-kader-belot-ke-duet-prabowosandi-agung-laksono-langkah-baik>diakses pada Februari 2020

<https://www.jubi.co.id/staging/ketua-dprd-yahukimo-mari-mirin-saya-terpilih-karena-loyalitas-dedikasi-dan-prestasi>diakses pada Februari 2020

<https://jamberita.com/read/2019/09/16/5953054/raih-suara-terbanyak-kedua-terbanyak-kedua-seindonesia-di-partai-golkar-hba-dianugrahi-medali-platinum-->diakses pada Februari 2020

<http://beritalima.com/prestasi-gemilang-partai-golkar-karanganyar-dibawah-pimpinan-yuliatmono>diakses pada Februari 2020

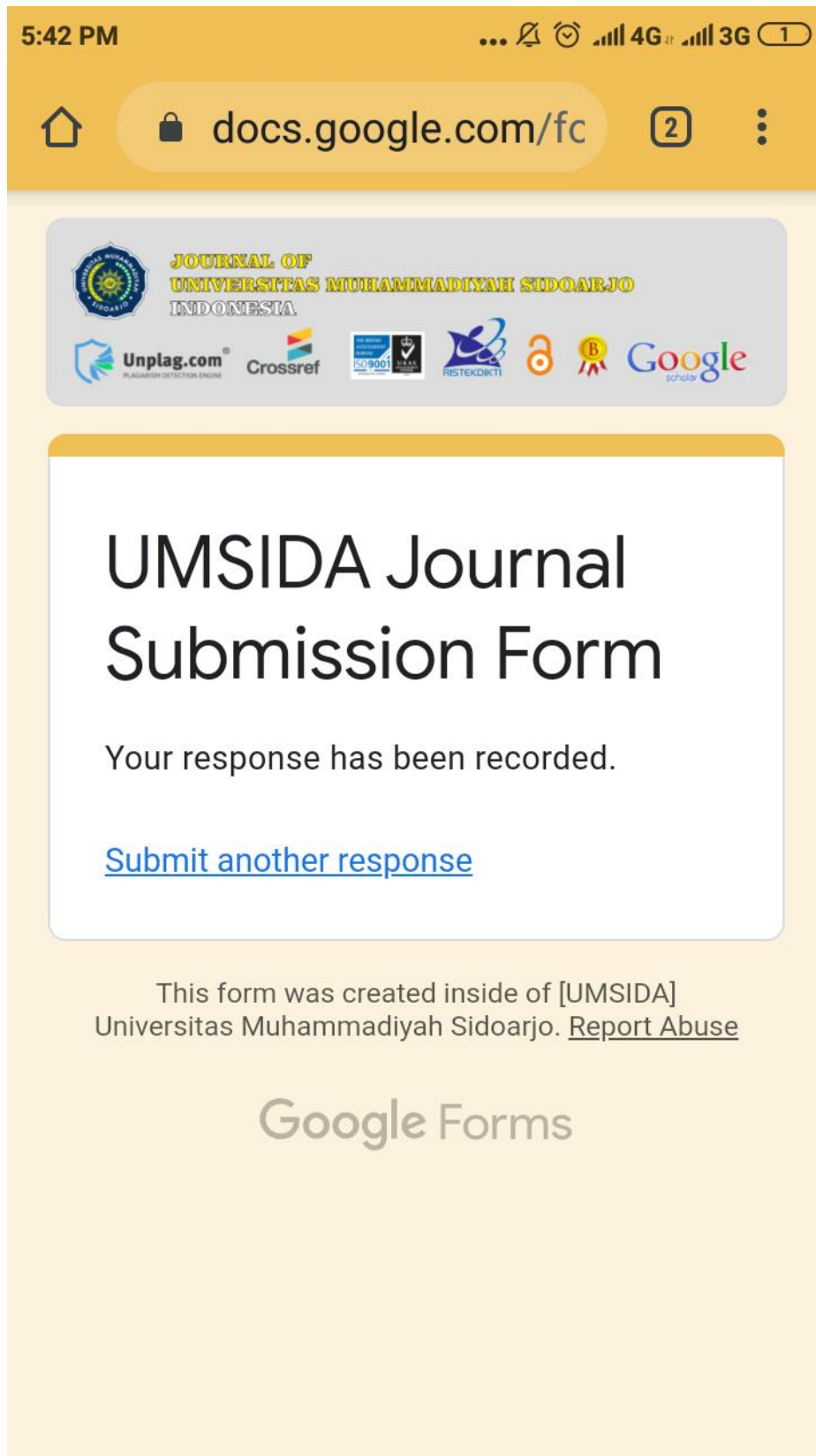
<https://m.detik.com/news/berita/d-4774814/hut-ke-55-golkar-beri-penghargaan-khusus-karya-utama-ke-jk> diakses pada Februari 2020

<http://indonesiasatu.co/detail/berprestasi-dalam-pemilu-dpp-partai-golkar-beri-penghargaan-kepada-dpd-i-ntt> diakses pada Februari 2020

<https://www.bengkuluinteraktif.com/dipimpin-rohidin-mersyah-golkar-bengkulu-sandang-penghargaan-terbaik> diakses pada Februari 2020

<http://detak-palembang.com/2019/11/airlangga-dinilai-berhasil-tempatkan-kader-terbaik-di-kabinet/> diakses pada Februari 2020

LAMPIRAN



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama : : 1. Pahman Habibi  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Kramat Sentiong V E 154 Kramat Senen Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Bertipe : : Jurnal  
Berjudul : : Strategi Perkaderan Partai Politik dalam Regenerasi  
Kepemimpinan Nasional

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni tulis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian ~~sengketa~~ persidika maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau persidika di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:

- a. pemohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
- b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditanggunkan menanggung putusan Pengadilan yang bertekadatur hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini sayakami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta , 1 Mei 2020

Materai 6.000,-  
(Pahman Habibi)  
Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta eger menandatangani di atas materai.